

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
SURVEY PADA PEMERINTAH KABUPATEN DI SELURUH JAWA BARAT**

Silviana

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung

Erwin Antoni

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)

Abstract

The government has then performed reforms in financial management area , but the reality is still minimal government financial statements that get unqualified opinion (WDP). This study was conducted to analyze the effect of application of Accounting Information System on the Quality of Local Government Financial Statements. The method used is explanatory. Data collection was conducted using a questionnaire distributed to Auditors Audit Board of the Republic of Indonesia - West Java Provincial Office. Analysis tools using simple linear regression. This research resulted in findings of the application of the accounting information system have an influence on the quality of local government financial reports. It was found that there are factors that are still less than optimal like information system computerize not yet intergration with other division, competencies include human resource accounting educational background is still minimal in finance department. In other words accounting system have to integration with all division to accelerate process making financial statement, and thus accounting for personnel knowledge is a factor that must be considered in improving the quality of local government financial statement.

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000 pemerintahan yang baik merupakan pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh rakyat. *Good government governancetercermin dalam proses pengelolaan keuangan, penyajian laporan keuangan serta akuntabilitas keuangan pemerintah. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka mewujudkan good governance, diantaranya; pada kurun waktu tahun 1999 sampai dengan 2005 telah dikeluarkan paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang meliputi yaitu UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga paket UU ini merupakan produk legislasi sebagai wujud dari kehendak untuk melaksanakan reformasi di bidang keuangan negara sekaligus menuntut suatu perubahanmendasar di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. (Anwar, 2009).*

Reformasi Keuangan Negara tahun 2003 tersebut, telah menuntut profesionalitas pengelolaan keuangan negara, yang akan mengingatkan adanya suatu keharusan bahwa laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi, sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). (I Gde, 2005).

Hasil pemeriksaan BPK RI semester I tahun 2011 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disajikan dalam tiga buku, buku pertama mengenai opini, buku

kedua mengenai Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan buku ketiga kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, menunjukkan saat ini perkembangan kualitas laporan keuangan atas LKPD belum sebagaimana yang diharapkan, hal ini terlihat dari opini atas LKPD yang diberikan oleh BPK RI masih ada yang mendapatkan opini *disclaimer* atau tidak memberikan pendapat (TMP). Perkembangan Opini LKPD pada Kabupaten di Jawa Barat pada Tahun 2006 sampai dengan 2010 dapat dilihat pada tabel 3. Pada tahun 2010, menunjukkan fenomena laporan keuangan pemerintah daerah semuanya masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pegecualian (WDP).

Salah satu faktor pendukung kualitas laporan keuangan adalah sistem informasi akuntansi, dimana laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik dan output yang baik. Ketiga aspek tersebut haruslah terpadu dan berkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik. (Kurniawan, 2011).Sistem informasi akuntansi merupakan suatu komponen atau sub sistem dari suatu organisasi yang mempunyai tanggung jawab atas penyiapan informasi keuangan guna membantu manajemen dalam pembuatan keputusan. Setiap manajemen dalam sebuah organisasi memerlukan informasi yang berbeda sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimilikinya. Semakin rendah tingkat manajemen memerlukan informasi yang rinci mengenai operasi dan kegiatan yang akan dilakukan, semakin tinggi tingkat manajemen membutuhkan informasi yang lebih ringkas.

Kualitas informasi akuntansi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Bagian akuntansi dituntut untuk dapat menghasilkan informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. Apabila semua faktor telah dipertimbangkan maka manajemen mempunyai risiko yang lebih kecil dalam membuat kesalahan di dalam pengambilan keputusan.Menurut Machfudz (2000) semua faktor penting untuk mendukung manajemen mengambil keputusan yang tepat adalah dengan memanfaatkan informasi akuntansi yang tersedia dan disajikan dengan baik.

Fenomena yang menggambarkan kelemahan SPI berkaitan dengan penerapan sistem informasi akuntansi di pemda, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2011 ditemukan sebanyak 1.401 kasus kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan, diantaranya disebabkan oleh pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat; proses penyusunan tidak sesuai ketentuan; entitas terlambat menyerahkan laporan; sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai; sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Tabel lengkap mengenai kelemahan sistem informasi akuntansi dapat dilihat pada tabel 1 menunjukkan penerapan sistem informasi akuntansi masih belum optimal pelaksanaannya.

Tabel 2
Rekapitulasi Hasil Temuan BPK RI
berkaitan dengan Kelemahan Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan	Jumlah kasus
Pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat	784
Proses penyusunan tidak sesuai ketentuan	371
Entitas terlambat menyerahkan laporan	24
Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	204
Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai	17
Lain-lain	1

Sumber; IHPS BPK RI semester I TA 2011

Hasil pemeriksaan BPK tahun 2011 atas LKPD Jawa Barat, mengenai penerapan sistem informasi akuntansi, sebagai berikut:

Tabel 3
Kelemahan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Kabupaten di Jabar

Kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan	Jumlah kasus	Kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan	Jumlah kasus
Kab. Bandung Barat	12	Kab. Bekasi	6
Kab. Cirebon	5	Kab. Bandung Barat	12
Kab. Indramayu	6	Kab. Bandung	6
Kab. Subang	5	Kab. Indramayu	10
Kab. Tasikmalaya	7	Kab. Garut	10
Kab. Sumedang	5	Kab. Cirebon	5
Kab. Sukabumi	8	Kab. Cianjur	5
Kab. Subang	11	Kab. Ciamis	7
Kab. Purwakarta	3	Kab. Bogor	6
Kab. Majalengka	5	Kab. Karawang	6
Kab. Kuningan	6		

Sumber: BPK-RI, IHPS semester I tahun 2011

Menurut Solikin (2011), berbagai upaya telah dilakukan pemda untuk meningkatkan kualitas LKPD, seperti yang dilakukan oleh pemda provinsi (pemprov) Jawa Barat dalam rangka menyajikan laporan keuangan yang andal, pemprov telah melakukan penertiban aset, terutama eksistensi aset, hak kepemilikan aset, kelengkapan, penilaian dan pengungkapan aset.

Upaya ini dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi teknologi informasi siklus barang daerah, dan diimplementasikan juga sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dalam upaya penyajian laporan keuangan yang andal dan kecepatan dalam penyajiannya (tepat waktu).

Pemanfaatan laporan keuangan dilakukan pada saat penyampaian pertanggungjawaban APBD kepada legislatif sesuai ketentuan yang berlaku dan dilakukan setahun sekali. Pemanfaatan laporan keuangan sebagai bahan untuk diperiksa oleh BPK RI, hasilnya pada bulan Juni tahun berikutnya. Penyajian laporan keuangan yang belum *realtime* (masih bersifat tahunan/output diakhir tahun) dan bersifat angka-angka historis, mengakibatkan laporan keuangan belum bisa sepenuhnya dimanfaatkan dalam proses pengambilan kebijakan/keputusan manajemen pemerintahan sehari-hari. Laporan keuangan (terutama yang WTP) belum digunakan sebagai persyaratan dalam pengambilan kebijakan menyangkut alokasi pendanaan ke daerah.

Tujuan laporan sektor publik lebih rumit dibandingkan sektor swasta, karena menyangkut aspek ekonomi, serta aspek sosial dan politik dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan cenderung hanya bisa menyajikan aspek ekonomi (melalui jenis belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi) sedangkan aspek sosial dan politik tentunya sulit untuk disajikan dalam laporan keuangan. Sulit untuk menilai atau mengukur dari laporan keuangan apakah sektor publik telah memberikan pelayanan secara efisien dan efektif kepada rakyatnya.

Hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD kabupaten di Jawa Barat menggambarkan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah masih lemahnya penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang terpadu dan berkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan masih ada pertentangan hasil penelitian terkait topic penelitian ini, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Kontingensi

Perkembangan terbaru penelitian teori kontingensi termasuk apa yang kemudian dikenal sebagai pendekatan "sistem". Pendekatan sistem holistik mempertimbangkan beberapa efek kontinjensi dan mungkin saling bertentangan pada kinerja unit -kerja dalam rangka mempromosikan pemahaman yang lebih lengkap dari desain unit -kerja. Otley (1980) menyatakan tidak ada sistem yang secara universal selalu tepat diterapkan pada seluruh organisasi pada setiap keadaan, tetapi sistem akuntansi tersebut tergantung pada faktor-faktor situasional dalam organisasi.

Decision Usefulness Theory

Teori kegunaan-keputusan informasi akuntansi merupakan bagian dari teori normatif. Teori kegunaan-keputusan (*decision-usefulness theory*) dari informasi akuntansi dikemukakan dalam disertasi Staubus untuk pertama kalinya pada tahun 1954. Pendekatan model keputusan ditujukan untuk mengetahui informasi apa yang diperlukan untuk membuat keputusan. Teori kegunaan-keputusan mencakup mengenai syarat dari kualitas informasi akuntansi yang berguna dalam keputusan yang akan diambil oleh pengguna. Kegunaan-keputusan informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya.

Premis dari teori kegunaan-keputusan adalah: Tujuan akuntansi untuk menyediakan informasi keuangan mengenai organisasi guna pengambilan keputusan; Tujuan akuntansi dikaitkan dengan *stakeholder* adalah menyediakan informasi keuangan mengenai suatu organisasi yang akan digunakan dalam pembuatan keputusan. Sikap manajemen terhadap penerapan suatu standar akuntansi berhubungan dengan kepentingannya terhadap pengungkapan informasi akuntansi yang menggambarkan kinerja finansial dalam bentuk pelaporan keuangan. Teori kegunaan-keputusan informasi akuntansi tercermin dalam bentuk kaidah- kaidah yang harus dipenuhi oleh komponen-komponen pelaporan keuangan agar dapat bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi.

Pengelompokkan *users* dalam konsep *decision-usefulness* terbagi dalam tiga kelompok yaitu kelompok masyarakat, kelompok legislatif dan kelompok dewan pengawas. Kelompok masyarakat menggunakan laporan keuangan pemerintah untuk mengevaluasi keefesienan dan keefektifan kegiatan yang dilakukan pemerintah, membandingkan hasil program yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya, menaksir operasional keuangan dan kondisi keuangan, dan untuk menentukan terlaksananya anggaran yang dibuat. Kelompok dewan pengawas menggunakan laporan keuangan pemerintah untuk mengevaluasi pendanaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh eksekutif, membandingkan antara anggaran yang telah dibuat dengan realisasi anggaran yang terjadi, pengawasan aktivitas dana dan posisi keuangan untuk menganalisis keseimbangan dana.

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Akuntansi dan sistem informasi akuntansi bertitik tolak dari suatu landasan yang terdiri dari berbagai konsep, yaitu konsep mengenai akuntansi itu sendiri, konsep sistem, konsep informasi, konsep organisasi dan konsep pengambilan keputusan. (Nunuy, 2009). Akuntansi merupakan fungsi pelayanan yang bertujuan untuk menyediakan pengguna informasi kuantitatif, di sisi lain SIA dirancang untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, dan melaporkan data dan informasi. SIA dapat berupa sistem manual atau sistem komputerisasi menggunakan komputer. (Mahdi et. al 2010)

Romney, et. al (2003); W. Wilkinson (2000) mendefinisikan sistem sebagai suatu kelompok yang terdiri atas komponen-komponen (fungsi, manusia, aktifitas, dan lain-lain) yang saling berhubungan dan saling mendukung untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Informasi merupakan data yang sudah dimanifestasikan dalam bentuk tertentu, sehingga bagi yang memerlukannya merupakan sesuatu yang berguna, mempunyai atau diharapkan akan mempunyai nilai nyata sebagai sarana dalam proses pengolahan data menjadi informasi. (Bodnar,2010; Jeffrey L Whitten, 2004)

Wilkinson (2000) menekankan fungsi sistem informasi dalam transformasi data menjadi informasi yang akan digunakan dalam mendukung pengambilan keputusan oleh organisasi, dengan mengetengahkan dimensi pelaksana, data, proses, dan teknologi informasi. Sistem informasi berfungsi untuk mendukung aktivitas-aktivitas yang dijalankan sistem bisnis (organisasi). Konsekuensinya, sistem informasi dalam hal ini dipandang sebagai subsistem dari sistem bisnis (organisasi). Sistem informasi mengumpulkan informasi yang diinginkan untuk pengambilan keputusan. Perubahan latar belakang bisnis komprehensif dengan munculnya komputer dan internet, untuk itu struktur bisnis memerlukan perubahan informasi, dan daya saing sebagai faktor utama bagi kehidupan organisasi. Informasi diperlukan untuk menghadapi tantangan perubahan teknologi informasi dan sebagai alat strategis organisasi. (Mohammed et. al, 2011)

Karakteristik yang menonjol dari kerangka sistem informasi diantaranya dimensi sumberdaya, meliputi: data, pelaksana atau personalia, perlengkapan, peralatan, dan dana; dimensi tugas, meliputi: pengumpulan data, pemrosesan data, manajemen data, pengendalian data, pengadaan informasi; dimensi tujuan, meliputi: dukungan terhadap pengambilan keputusan, dukungan terhadap operasi harian, dukungan terhadap kewajiban kepengurusan; dimensi pemakai informasi, meliputi: manajer, pegawai, pemilik dan pemakai eksternal lainnya; dimensi tahapan, meliputi: masukan, pemrosesan, keluaran. (Nunuy, 2009).

SIA merupakan sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi, informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan. (Bodnar & Hopwood, 2007). Barry (2003) menambahkan modal dalam organisasi, sedangkan Romney & Paul (2004) menyatakan sistem informasi akuntansi merupakan serangkaian dari satu atau lebih komponen yang saling berelasi dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan, yang terdiri dari pelaku, serangkaian prosedur, dan teknologi informasi.

Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah

Pada sistem akuntansi pemerintah, ada beberapa ciri terpenting atau persyaratan yang diperlukan, diantaranya: sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. Sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit. Sistem akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk penyusunan rencana/program dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan. (Sonny Loho & Sugiyanto, 2004),

Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan adanya dukungan Sistem Informasi Keuangan Daerah untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi. Sistem informasi akuntansi pada pemerintahan daerah lebih dikenal dengan nama sistem informasi keuangan daerah (SIKD). SIKD merupakan sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah serta data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. (PP 65 / 2010). Pemerintahan Daerah sebagai organisasi sektor publik, agar dapat berjalan efektif, efisien, transparan dan bersih diperlukan dukungan dari sistem informasi akuntansi yang memadai agar informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk manajemen keputusan dan pengendalian keputusan.

SIKD yang diterapkan di pemda sesudah periode 2005 berbasis desentralisasi, pengguna SIKD adalah Kepala Daerah, bahkan memungkinkan dan mengharuskan para manajer pemerintah (perangkat) daerah (Kepala Badan, Kantor, Dinas dan Unit lainnya) untuk menggunakan SIKD, sebab Kepala Daerah bukan satu-satunya pengambil keputusan penganggaran, namun telah terdistribusi ke unit-unit yang lebih bawah. Fakta empiris menggambarkan kewenangan formal dimiliki oleh Kepala (Syafuddin, 2006). Tujuan penyelenggaraan SIKD, diantaranya membantu kepala daerah menyusun anggaran dan laporan pengelolaan keuangan daerah, merumuskan kebijakan keuangan, mengevaluasi kinerja keuangan, menyediakan kebutuhan statistik keuangan, menyajikan informasi secara terbuka kepada masyarakat dan mendukung penyediaan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan dalam SIKD nasional. (PP 65/ 2010)

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam PP 58 / 2005 dan Pemendagri 13 / 2006 Pasal 3 mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD serta rancangan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang dimulai dari tata cara penyusunan, penetapan, pelaksanaan, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah dan pembinaan serta pengawasan pengelolaan keuangan daerah. PP 24/2005 dalam penyusunan pelaporan keuangan daerah, diperlukan sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan yang disebut dengan sistem akuntansi.

Beberapa penelitian mengenai penerapan sistem informasi akuntansi pada pemerintah daerah, Diana (2005), menemukan kendala-kendala yang dihadapi Pemda dalam rangka penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dari yang berbasis kas menjadi kas modifikasi akrual, Tuasikal, (2007). Informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai dihasilkan dari laporan keuangan yang disusun oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi. Mahdavi dan Funnel (2003) melakukan penelitian mengenai implementasi SIA pada Republik Islamik Iran. Kesimpulan penelitian menyatakan 29 sistem informasi pemerintah yang ada sekarang ini belum memadai memberikan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan pengendalian yang efektif atas dana pemerintah.. Flynn (1992) dalam penelitiannya mengemukakan hanya 20% sistem informasi berhasil digunakan, argumen ini menunjukkan penting untuk mengevaluasi keefektifan SIA. Gelinas (2000) menganggap efektivitas SIA sebagai ukuran keberhasilan untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Nunuy (2009), meneliti kompetensi aparatur pemda terhadap pelaksanaan 29 sistem informasi akuntansi di pemda. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan 29 sistem informasi akuntansi. Pornpandejwittaya (2012), penelitian mengenai efektivitas SIA mengacu

pada mengumpulkan, input, memproses data, menyimpan, mengelola, mengendalikan, dan informasi laporan akuntansi sehingga organisasi dapat mencapai kualitas laporan keuangan

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan fase terakhir dari proses akuntansi pemerintah daerah. Laporan keuangan sektor publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. (Masmudi, 2003) Laporan keuangan merupakan suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan, merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Pernyataan dalam laporan keuangan daerah dapat bersifat implisit dan eksplisit mengenai: keberadaan, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian dan alokasi, penyajian dan pengungkapan dan ketaatan dan kepatuhan. Tujuan pelaporan keuangan sektor publik ada dua yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan memenuhi kebutuhan pemakai. Tujuan khusus untuk mengidentifikasi sumber daya yang didapat dan digunakan sesuai persetujuan DPR/D; menyediakan informasi alokasi sumber daya, pembiayaan, komitmen dan kewajiban, kondisi keuangan dan perubahan organisasi sektor publik, informasi untuk dievaluasi performansi organisasi sektor publik. *Public Sector Committee – International Federation Accounting Committee* (2010).

Pengguna Laporan Keuangan

Pengguna laporan keuangan pemda, menurut Drebin et. al(2005); IFAC-PSC (2010), diantaranya manajemen, badan pengawas/ pemeriksa, pegawai, pembayar pajak, pemberi dana bantuan, investor, pengguna jasa, pemasok, pemilih, konstituen/legislatif dan Analisis ekonomi dan keuangan. Pemerintah memanfaatkan informasi keuangan sebagai alat pengambilan keputusan dalam penyempurnaan kebijakan; Strategi pengembangan daerah; Perencanaan dan penganggaran daerah. Para pengguna laporan keuangan sektor publik memerlukan informasi yang dapat membantunya untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi, sosial-politik dan mengadakan evaluasi atas penggunaan sumber-sumber oleh pemerintah. Pengguna laporan keuangan juga perhatian terhadap rencana-rencana serta hasil dari pelaksanaan rencana-rencana tersebut, termasuk kinerja pemerintah dan kondisi keuangannya. Para pengguna laporan keuangan menginginkan laporan keuangan sektor publik dapat memberikan informasi mengenai: Pengurusan dan ketaatan; Kondisi keuangan; Kinerja; Dampak ekonomi, Pemeriksa mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya serta tindak lanjut atas rekomendasi yang signifikan dan berkaitan dengan tujuan pemeriksaan yang sedang dilaksanakan.

Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen laporan sektor publik di dalam *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS, 2010) terdiri dari: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Kinerja Keuangan, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Kebijakan Akuntansi dan Catatan Atas Laporan Keuangan, sedangkan dalam SAP 2005 LKPD paling sedikit terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami pemakai. Pemda wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemda harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Persyaratan normatif yang

disebutkan dalam kerangka konseptual PP 24/2005 antar lain dapat dipahami (*understandability*), relevansi (*relevance*), andal (*reliable*) dan dapat diperbandingkan (*comparability*).

Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi pemerintah daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Relevan

Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan dengan membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan harus: (a). memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu; (b). memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini; (c). tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan; dan (d). Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Andal

Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik: (a). penyajian jujur, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan; (b). dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh; (c). Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara intern dan ekstern. Perbandingan secara intern dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara ekstern dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

:Kerangka pemikiran yang menghubungkan antara penerapan sistem informasi akuntansi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

- Sistem informasi akuntansi memperbaiki dan mengkoreksi kesalahan pelaporan keuangan (Mahdavi dan Funnel, 2006). Penyusunan LK Pemerintah berdasarkan sistem akuntansi yang andal dan sesuai dengan SAP. (Purnomo, 2011)
- Efektivitas SIA dapat menyediakan informasi bagi manajemen untuk mengambil keputusan sehubungan dengan pengelolaan organisasi. (Flynn, 1992).
- Menurut Bodnar dan Hopwood (2010), "Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi, informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan."
- Barry E. Cushing (2003) menyatakan "Sistem informasi akuntansi merupakan seperangkat sumber manusia dan modal dalam organisasi, yang berkewajiban untuk menyajikan informasi keuangan dan juga informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan memproses data."
- Efektivitas SIA mengacu pada mengumpulkan, input, memproses data, menyimpan, mengelola, mengendalikan, dan informasi laporan akuntansi sehingga organisasi dapat mencapai kualitas laporan keuangan. Pornpandejwittaya (2012).

METODE PENELITIAN

Objek penelitian adalah penerapan SIA dan Kualitas LKPD. Subjek penelitian Pemerintah Kabupaten seluruh Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah *sensus*, sedangkan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian penjelasan (*explanatory research*). Pada penelitian ini untuk mencari fakta dan keterangan secara faktual yang dikumpulkan dari responden menggunakan kuesioner. Respondennya adalah auditor BPK-RI.

Tabel.1
Operasionalisasi variabel penelitian sebagai berikut:

<p>Penerapan SIA Bodnar (2010) Jeffrey L Whitten, 2004) W. Wilkonson (2000); PP 56/2005. NunuyNurafiah (2009)</p>	<p>1.Sumberdayapersonalia/ pelaksanaperalatan, danaturan hukum 2.Tugas 3.Tujuan</p>	<p>1. Ketersediaan sumberdaya manusia yang cakap untuk melaksanakan sistem informasi akuntansi 2. Kelayakan peralatan yang digunakan untuk proses akuntansi 3. Adanya peraturan daerah atau keputusan kepala daerah yang mengatur sistem informasi akuntansi 4. Terlaksananya pemrosesan data yang akurat 5. Terkendalinya data 6. Terlaksananya penyediaan dan dtribusi informasi tepat waktu 7. Terpenuhinya kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan dalam proses perencanaan dan pengendalian operasi</p>
<p>Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (SAP 24/2005, IPSAS (2010)</p>	<p>Dapatdipahami</p>	<p>1. Menggunakan istilah yang dapat dipahami 2. Disusun sistemastis sesuai SAP 3. Digunakan dalam pengambilan keputusan</p>
	<p>Relevan</p>	<p>1. manfaat umpan balik 2. manfaat prediktif (peramalan) 3. tepatwaktu 4. lengkap</p>
	<p>Keterandalan</p>	<p>1. penyajian yang jujur 2. dapat diverifikasi 3. netralitas</p>
	<p>Dapat diperbandingkan</p>	<p>1. konsistensi penerapan 2. kebijakan akuntansi 3. perbandingan antar waktu 4. perbandingan antar entitas</p>

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten di Jawa Barat. Untuk menentukan ukuran populasi atau ukuran sampel dalam penelitian ini mengacu pada pernyataan Arikunto(2010) bahwa : “Untuk menentukan berapa kira-kira anggota sampel yang akan diambil sebagai sampel, maka apabila subyek kurang dari seratus lebih baik diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi (*sensus*)”.

Data yang diperoleh dari para responden perlu di uji validitas dan reliabilitasnya untuk menghindari hal-hal yang bias dan meragukan keabsahan penelitian ini, maka diperlukan pengujian-pengujian terhadap alat ukur tersebut dengan menggunakan Uji validitas dan reliabilitas. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan analisis regresi sederhana.

Model penelitian yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + bX + \varepsilon$$

Y = Kualitas LKPD

X = Penerapan SIA

ε = error

Berhubung data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data seluruh populasi atau sensus, maka tidak dilakukan uji signifikansi. Menurut Cooper and Schindler (2006; 492), uji signifikansi dilakukan untuk menentukan keakuratan hipotesis berdasarkan fakta yang telah dikumpulkan dari data sampel, bukan data sensus. Jadi untuk menjawab hipotesis penelitian, koefisien regresi yang diperoleh langsung dibandingkan dengan nol.

Hasil Penelitian, Implikasi Penelitian dan Keterbatasan Penelitian

Dari hasil pengujian validitas dan reliabilitas menunjukkan hasil bahwa hasil pengolahan menggunakan korelasi *rank Spearman* (indeks validitas) diperoleh nilai indeks validitas untuk seluruh variabel berkisar 0,426 sampai dengan 0,750, lebih besar dari nilai kritis 0,30 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan yang digunakan untuk mengukur kelima variabel sudah valid sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan metode *split-half* diperoleh hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai koefisien reliabilitas berkisar 0,930 sampai dengan 0,950 lebih besar dari 0,70 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan yang digunakan untuk mengukur kelima variabel sudah reliabel sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Dari hasil pengujian analisis regresi linear sederhana didapatkan hasil sebagai berikut:

$$Y = 38,256 + 0,354 X + \varepsilon$$

Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis:

$H_0 : \beta X = 0$ Penerapan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah kabupaten di Jawa Barat

$H_a : \beta X \neq 0$ Penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah kabupaten di Jawa Barat.

Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh nilai koefisien regresi dari variabel penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,354, karena nilai koefisien regresi lebih besar dari nol maka disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah kabupaten di Jawa Barat. Penerapan sistem informasi akuntansi memberikan kontribusi sebesar 20,23% terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah,

Dari hasil analisis pengujian dapat disimpulkan bahwa Penerapan SIA berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Berdasarkan jawaban responden dari entitas yang diteliti, SIA

merupakan sistem yang terintegrasi dalam menghasilkan laporan keuangan, walaupun terdapat faktor-faktor yang masih kurang optimal diantaranya kompetensi sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan akuntansi juga masih minim di bagian keuangan maupun di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Minimnya jumlah lulusan akuntansi yang bekerja di pemda (bagian keuangan), karena penerimaan pegawai yang berlatar belakang akuntansi jumlahnya sangat sedikit.

Implikasi teori menunjukkan bahwa akuntansi sektor publik, dalam penerapannya tidak dapat dipisahkan dengan disiplin ilmu lainnya seperti Sistem Informasi Akuntansi (SIA), dimana SIA memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dan dapat bekerja sama dengan pihak lain, agar reviu dapat dilaksanakan dengan lancar, integrasi sistem dapat terjalin dengan baik untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, selain itu juga tidak dapat dipisahkan dengan ilmu psikologi, SDM yang menerapkan sistem mempunyai pengaruh terhadap kualitas LKPD, jadi berkaitan dengan perilaku manusia.

Bagi pemerintah kabupaten di seluruh Jawa Barat hendaknya menyediakan anggaran yang cukup bagi sumberdaya manusia sehingga dapat lebih meningkatkan lagi kompetensi sumberdaya manusia, menyediakan fasilitas (teknologi informasi yang terintegrasi) dan peraturan yang berkaitan dengan penerapan SIA dalam rangka meningkatkan kualitas LKPD, misalnya dengan lebih sering mengikutsertakan SDM dalam diklat-diklat terkait penerapan SIA dalam rangka meningkatkan kualitas LKPD, memiliki sertifikasi akuntansi sektor publik terkait dengan kompetensi yang harus dimiliki SDM terkait bidang kerjanya seperti yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

Keterbatasan penelitian ini yang mungkin dapat diperbaiki oleh penelitian selanjutnya adalah dengan menambah responden penelitian, tidak hanya menyebarkan kuesioner di BPK tetapi juga di organisasi pemerintah daerah, agar dapat lebih mengetahui kondisi atau fakta yang sebenarnya mengenai penerapan SIA dan kualitas LKPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Barry E Cushing, Romney Marthal D, 2003. Accounting Information System. John Adison Wisley.
- Bodnar H George William S. Hopwood. 2007. Accounting Information System..Edisi 9.Terjemahan. Penerbit Andi.
- Cooper, D. R, & Schindler, P. S. (2006). Business Research Methods.(9th ed.). International edition. Mc Graw Hill
- Drebin, A.R. Chan, J.L dan Fergusi. 2005. Objectives of Accounting and Financial reporting for governmental units. *A research study national council on governmental accounting*. Vol 1 & 2
- Ferdy van Beest, Geert Braam, dan Suzanne Boelens. 2009. Quality of Financial Reporting: measuring qualitative characteristics. *Nijmegen Center for Economics (NiCE). Working Paper 09-108* April
- Flynn D. 1992. Information systems Requirements: Determination and Analysis. MCGRAW – HILL Book Company.
- International Public Sector Accounting Standard. 2010. Glossary Handbook. IPSAS.
- Kurniawan Selamat.2011. Penyerahan Hasil Pemeriksaan tahun anggaran 2010. Warta BPK. Juni 2011. <http://bandung.bpk.go.id/web/?p=3699>. diunduh 24 Februari 2012
- Machfudz Mas'ud, 2000, Akuntansi Manajemen; Edisi IV, BPFE, Yogyakarta
- Mahdi Salehi, Mahmood Hemmatfar, Marziyeh Bayat, 2010. Competitive Advantages and Strategic Information Systems. *International Journal of Business and Management*. Vol. 5, No. 7; July

- Mahdavi and Funel 2003.Public Sector Accountability and Accounting Information System in the Islamic republic Iran.*Iranian Journal of Information Science and Technology*, Volume 1 Number 2. July
- Masmudi, 2005, Laporan Keuangan Sektor Publik, antara Konsep dan Praktek. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, volume 3 nomor 1.
- Mohammed Al-Shetwi, Shamsheer Mohamed Ramadili. Taufiq Hasan SC. Zulkarnaen MS. 2011. Impact of Internal Audit Function on Financial Reporting Quality; Evidence from Saudi Arabia.*African Journal of Business Management* Vol.5. ISSN 1993-8233
- Mohammadi. M., 2003. An examination of effectiveness of a liquidated budget on public companies budgeting (by looking at the budget of transportation companies), M.A. dissertation, Islamic Azad University, Science and Research branch.
- Moscove, SM Simkin and Bagnaroff 2009.Core concept of Accounting Information System.Newyork, NY, JohnWiley&Sons. Inc
- Mudrajad Kuncoro, 2007. Metode Riset untuk bisnis dan ekonomi.Penerbit Erlangga Jakarta.
- Nuraeni, and Dwi Martani. 2012. The Impact of Local Governments characteristic toward their audit quality for financial report of 2008-2009. 3rd *international conference on business and economic research*.
- Otley, DT. 1980. The contingency theory of management accounting. Achievement and prognosis. *Accounting organization and society*.
- Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS
- Pornpandejwittaya, Pairat. 2012. Effectiveness of accounting information system: effect on performance of Thai-listed firms in Thailand. *International Academy of Business and Economics*ISSN:1555-1296 Copyright: 07/01/2012..
- Purnomo. Hadi 2010. Opini Laporan Keuangan Pemerintah <http://www.bpk.go.id/web/files/2010/01/029>
- PP RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- PP RI Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Solikin Ahmad 2005. Penggabungan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah: Perkembangan dan Permasalahan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol. 2.No.2 November.
- Sonny Loho & Sugiyanto, 2004.Sistem akuntansi pemerintah.www.ksap.org/Riset&Artikel/Art5.pdf 7.Juli.diunduh tanggal 12 November 2011
- Suharsimi Arikunto, 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi IV. Rineka Cipta Jakarta.
- Syafruddin (2006). Dampak struktur kekuasaan penggunaan SIKD untuk kontrol keputusan dan manajemen keputusan dan prilaku manajerial. Studi pada organisasi pemerintah.*SNA* 9 Padang.
- UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
- Yousef Shahwan, (2008) "Qualitative characteristics of financial reporting: a historical perspective", *Journal of Applied Accounting Research*, Vol. 9 Iss: 3, pp.192 - 202